

Wamendagri Bima Arya Tinjau Posko Banjir di Solok: Apresiasi Gerak Cepat Pemkab dan Tekankan Penguatan Mitigasi

AmeliaRiski_JIS Sumbar - SOLOK.TELISIKFAKTA.COM

Dec 1, 2025 - 22:51



SOLOK – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya melakukan kunjungan langsung ke Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Senin, 1 Desember 2025. Kehadiran Wamendagri bersama rombongan disambut hangat oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra, Ketua DPRD Iponi Munir, Kapolres Solok Kota AKBP Mas'ud

Ahmad, Dandim 0309 Solok Letkol Kav Sapta Raharja, Kepala Kejaksaan Negeri Solok, unsur OPD, organisasi masyarakat, dan para relawan yang sejak awal berjibaku menangani dampak bencana.

Dalam laporannya, Wakil Bupati Solok H. Candra memaparkan kondisi terkini penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Solok. Ia menyampaikan bahwa sebanyak 2.955 warga kini mengungsi yang tersebar di Nagari Paninggahan, Nagari Muaro Pingai, dan Nagari Lolo. Secara keseluruhan lebih dari 7.000 jiwa terdampak, dengan korban jiwa nihil, serta tiga orang dilaporkan mengalami luka-luka.

Selain itu, Wabup Candra menguraikan kerusakan infrastruktur yang cukup berat. Terdapat tiga jembatan yang terputus di Kubang Sawah Suduik Selayo, Jembatan Paninggahan, serta Jembatan Muaro Pingai. Beberapa ruas jalan juga mengalami kerusakan parah, seperti ruas Sumantri-Baing, Batang Hari-Pakan Selasa, Saningbaka-Jambak, Lingkung Saningbaka, serta Simpang Tanjung Nan Ampek-Aia Rarak. Tidak hanya itu, 204 unit rumah tercatat rusak berat, sementara fasilitas umum yang terdampak meliputi lima sekolah, lima rumah ibadah, satu puskesmas, serta sejumlah infrastruktur irigasi dan instalasi air bersih (PDAM).

Wabup Candra menegaskan bahwa penanganan dilakukan secara kolaboratif dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, unsur Forkopimda, serta gotong royong dari 58 nagari yang tidak terdampak bencana. Ia juga melaporkan bahwa akses vital menuju Nagari Saniangbaka berhasil kembali dibuka pada 30 November 2025.

“Kami telah mendirikan posko utama, membuka dapur umum sebanyak 12 lokasi, menyalurkan obat-obatan, melakukan evakuasi warga, dan berkoordinasi secara intensif dengan BNPB serta Pemerintah Provinsi. Hari ini seluruh unsur kembali terjun melakukan gotong royong massal,” jelasnya.

Pemkab Solok juga telah menyiapkan langkah lanjutan berupa normalisasi sungai di Batang Imang dan Saningbaka, penyusunan proposal bantuan untuk BNPB dan Pemprov Sumbar, serta pendataan lanjutan terhadap pemukiman dan fasilitas terdampak. Total estimasi kerugian akibat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Solok mencapai Rp 47,5 miliar.

“Kami berharap melalui Pak Wamen, bisa disampaikan kepada Pak Menteri agar Kabupaten Solok mendapat keringanan dalam pemotongan anggaran efisiensi,” tambah Wabup.

Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menyampaikan apresiasi Presiden RI Prabowo Subianto terhadap langkah cepat Pemerintah Kabupaten Solok dan seluruh unsur yang terlibat.

“Presiden memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas gerak cepat seluruh pihak di Kabupaten Solok. Penanganan awal sudah sangat tepat, dan permintaan dari Pemkab tadi juga realistik. Nanti akan saya sampaikan langsung kepada Pak Menteri,” ujar Wamendagri.

Bima Arya menegaskan tiga fokus utama dalam penanganan bencana:

percepatan distribusi logistik, pemulihan listrik dan jaringan komunikasi, serta penguatan mitigasi oleh seluruh unsur Forkopimda. Ia menilai Sumatera Barat termasuk wilayah yang penyaluran logistiknya berjalan baik meski menghadapi tantangan akses.

“Distribusi logistik harus benar-benar terjaga. Di beberapa daerah sering terhambat akses sehingga bantuan terlambat. Namun di Sumbar, distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran,” tuturnya.

Selain memberikan arahan, Wamendagri Bima Arya juga membawa bantuan logistik yang akan langsung disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir dan longsor.

Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat pemulihan wilayah terdampak, serta memastikan seluruh kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera ditangani dengan baik.